LAMPIRAN I
Nota Dinas Direktur P2Humas
Nomor : ND-134 /PJ.09/2019
Tanggal : 07 Februari 2019

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

A. Latar Belakang Layanan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Badan Publik yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan layanan informasi publik selama Tahun 2018. Memenuhi Peraturan Menteri Keuangan 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/2016), untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pusat DJP, ditindaklanjuti oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I, adapun permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kanwil DJP, ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil DJP terkait selaku PPID Tingkat II, sedangkan permohonan layanan informasi yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pelayanan Pajak atau ditujukan ke unit vertikal di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III.

Selama Tahun 2018, permohonan informasi publik yang diterima oleh DJP berjumlah 13 (Tiga Belas) permohonan, 10 (Sepuluh) diantaranya merupakan penerusan permohonan informasi publik dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, 2 (Dua) merupakan permohonan langsung melalui surat ke PPID Tingkat I DJP dan 1 (Satu) permohonan langsung melalui surat ke PPID Tingkat III DJP. Sebagian besar Pemohon Informasi Publik merupakan kalangan akademisi yang meminta informasi perpajakan untuk kepentingan penelitiannya.

B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

   Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan tempat khusus untuk menerima permohonan informasi publik, yaitu:

a. untuk...

a. untuk permohonan informasi publik yang disampaikan ke Kantor Pusat DJP, terdapat tempat layanan informasi PPID yang disediakan oleh Direktorat P2Humas di lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP;



Tempat Layanan Informasi PPID di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

b. untuk permohonan informasi publik yang disampaikan ke Kanwil DJP, tempat khusus disediakan oleh masing-masing Bidang P2Humas Kanwil DJP;

c. untuk permohonan informasi publik yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, tempat khusus disediakan oleh masing-masing SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak.

Situs resmi DJP yaitu www.pajak.go.id menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik DJP yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

2. Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dari unit kerja di lingkungan DJP yang bertanggungjawab terhadap layanan informasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. PPID Tingkat I DJP
   1) Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan PPID Pusat;
   2) Direktur P2Humas selaku PPID Tingkat I DJP;
   3) Kepala Subdit Pelayanan Perpajakan (eselon III);
   4) Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi (eselon IV);
   5) Pelaksana Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi selaku petugas layanan informasi.

b. PPID Tingkat II DJP
   1) Kepala Kantor Wilayah DJP selaku PPID Tingkat II DJP;
   2) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon III);
   3) Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon IV) ;

4) Pelaksana...

4) Pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku petugas layanan informasi.

c. PPID Tingkat III DJP

1) Kepala Kantor yang membawahi unit eselon III selaku PPID Tingkat III DJP;
2) Kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal/Kepala SubBagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
3) Pelaksana SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal/Pelaksana SubBagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal selaku petugas layanan informasi.

3. Organ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak

Pembentukan Organ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan demi tercapainya koordinasi antar Pejabat Unit Eselon III dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, mudah, dan wajar. Susunan keanggotaan Organ PPID Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a) Kepala Bagian Umum sebagai Bagian Pengelolaan Data dan Informasi;
b) Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat sebagai Bagian Pengelolaan Layanan Informasi;
c) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum sebagai Bagian Pengelolaan Penyelesaian Sengketa.

C. Kegiatan Internal PPID

Selama Tahun 2018 tidak ada kegiatan khusus yang diadakan oleh PPID DJP. Pada Bulan Januari s.d. Februari Tahun 2018, telah dilaksanakan rapat pembahasan usul informasi publik dan uji konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan antara perwakilan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan perwakilan direktorat-direktorat terkait di DJP yang menguasai informasi publik bersama dengan perwakilan PPID Kementerian Keuangan tanggal 25 Januari 2018, 5 Februari 2018, 8 Februari 2018, 14 Februari 2018, dan 21 Februari 2018 di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Pada Hari Kamis, 19 Juli 2018 PPID Tingkat I DJP dikunjungi oleh PPID Kementerian Keuangan dalam rangka uji coba aplikasi SI-PPID Kementerian Keuangan. Hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 atasan PPID Tingkat I DJP, PPID Tingkat I DJP, dan sejumlah perwakilan PPID Tingkat II DJP menghadiri seminar 10

tahun...

tahun lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan dalam acara tersebut di-*launching* aplikasi SI-PPID oleh Menteri Keuangan.

Beberapa PPID Tingkat II DJP secara bergiliran mengikuti Bimbingan Teknis aplikasi SIPPID di Balai Diklat Keuangan Malang pada tanggal 30 Agustus 2018, 13 September 2018 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tanggal 20 September 2018 di Gedung Keuangan Negara Balikpapan, tanggal 8 November 2018 di Gedung Keuangan Negara Bandung, dan 6 Desember 2018 di Gedung Keuangan Negara Makassar yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Keuangan. Pada tanggal 6 November 2018 perwakilan PPID Tingkat I DJP dan perwakilan direktorat-direktorat terkait di DJP bersama tim PPID Kementerian Keuangan mengadakan kembali pembahasan usul informasi publik dan uji konsekuensi usul informasi publik yang dikecualikan dari Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.

D. Rincian Layanan Informasi Publik

Selama Tahun 2018, PPID DJP menerima 13 (Tiga Belas) permohonan Informasi Publik. Jika ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2018 maka semua permohonan informasi adalah mengenai perpajakan. Layanan Informasi Publik di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. Jalur Permohonan Informasi:
   a. surat: 13 permohonan informasi publik;
   b. email: 0 permohonan informasi publik; dan
   c. ruang layanan atau melalui petugas layanan informasi: 0 permohonan informasi publik.
2. Jumlah permohonan informasi yang diterima oleh perangkat PPID, yaitu:
   a. PPID Tk. I DJP: 12 permohonan informasi publik;
   b. PPID Tk. II DJP: 0 permohonan informasi publik; dan
   c. PPID Tk. III DJP: 1 permohonan informasi publik.
3. Kedudukan hukum pemohon, yaitu:
   a. WNI: 12 permohonan informasi publik; dan
   b. Badan Hukum Indonesia: 1 permohonan informasi publik.
4. Materi permohonan informasi adalah sebagaimana terlampir.
5. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik, yaitu:
   a. 1 s.d. 10 hari kerja: 6 permohonan informasi publik; dan
   b. 11 s.d. 17 hari kerja: 7 permohonan informasi publik.
6. Ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada pemohon, yaitu:
   a. diberikan seluruhnya: 4 permohonan informasi publik;

b. diberikan...

b. diberikan sebagian: 5 permohonan informasi publik;
c. tidak diberikan karena informasi tidak dikuasai: 2 permohonan informasi publik; dan
d. tidak diberikan karena dikecualikan: 2 permohonan informasi publik

E. *Pending Matters*

Semua permohonan informasi publik yang tercatat dalam register PPID Tingkat I DJP pada Tahun 2018 telah ditanggapi kepada pemohon informasi publik sehingga tidak ada *pending matters* terkait hal tersebut.

Direktur,

a.n. Hestu Yoga Saksama

LAMPIRAN II
Nota Dinas Direktur P2Humas
Nomor : ND- 134 PJ.09/2019
Tanggal : 07 Februari 2019

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2018

No.	Nomor Pendaftaran (1)	Tanggal Permohonan Masuk (2)	Penerusan / Diterima Langsung (Pilih *dropdown*) (3)	Nama Pemohon (4)	Kedudukan Hukum Pemohon: WNI/BHI (Pilih *dropdown*) (5)	Informasi yang Diminta (6)	Jalur Permohonan (Pilih *dropdown*) (7)	Tujuan Penggunaan Informasi (8)	Bentuk Informasi: *Hardcopy/Softcopy* (Pilih *dropdown*) (9)	Nomor Surat Pemberitahuan Perpanjangan (jika ada) (10)	Tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjangan (jika ada) (11)	Tanggal Pemberitahuan Tertulis (12)	Keputusan PPID: diberikan / tidak diberikan (Pilih *dropdown*) (13)	Alasan penolakan atau Alasan tidak diberikan seluruhnya (Pilih *dropdown*) (14)	Lama Waktu Pemberian Informasi (Hari Kerja) (15)	Tanggal Keberatan Diajukan kepada Atasan PPID (jika ada) (16)	Tanggal Tanggapan Keberatan dari Atasan PPID (jika ada) (17)	Tanggapan atas Keberatan dari Atasan PPID (jika ada) (18)
1	001/PPID.PJ/2018	9 Februari 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Cesilia Felixciatas Inggrita Padeng	Warga Negara Indonesia	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Menteng Satu, KPP Pratama Menteng Dua, KPP Pratama Sawah Besar Dua	Surat	Penelitian dan Skripsi	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan seluruhnya		16	-	-	-
2	002/PPID.PJ/2018	1 Maret 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Rina Junita Sugianto	Warga Negara Indonesia	Daftar Perusahaan Baja Asing yang Mendapatkan Fasilitas Tax Holiday Beserta dengan Periode Waktunya (Tahun Mendapatkannya)	Surat	Digunakan untuk melengkapi data-data tugas akhir kuliah (skripsi)	Naskah Elektronik (softcopy)				Tidak diberikan seluruhnya	Informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	13	-	-	-
3	003/PPID.PJ/2018	5 Maret 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Supardianto	Warga Negara Indonesia	Laporan Penerimaan SPT Badan, khususnya pihak startup, UKM, UMKM (jumlah WP Badan terdaftar khususnya pihak startup, UKM, UMKM dengan jumlah WP Badan yang lapor SPT)	Surat	Sebagai bagian dari data untuk menyusun penelitian thesis	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan sebagian		16	-	-	-
4	004/PPID.PJ/2018	16 Maret 2018	Diterima Langsung	Wahyudin Supratman	Warga Negara Indonesia	a. Salinan Peta Kadaster Hak/Pajak, Klasiran Tahun 1907-1942 masa Pajak "Verponding Indonesia" jenis pajak "Landrete" Buku Pajak Nomor: 35-36-3-38 Persil Nomor: (4b-d.II), (7b-d.I), (8b-d.II), (8c-d.V), (14c-d.V), pada masa itu berada dalam wilayah Administrasi District/Kewedanan Tjibalung, Desa Tjiteureup, Regetchapsraad/ Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Banten; b. Salinan Daftar Himpunan Objek Tanah yang terhimpun dalam buku Format 'A', Daftar Himpunan Subjek Tanah yang terhimpun dalam Buku Format 'B', masa pajak "Verponding Indonesia" jenis pajak "Landrete" Tahun 1907-1942 pada masa itu berada dalam wilayah Administrasi District/Kewedanan Tjibalung, Desa Tjiteureup, Regetchapsraad/ Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat, Keresidenan Banten	Surat	Kelengkapan data konversi dan penegasan hak milik atas tanah adat	Naskah Elektronik (softcopy)				Tidak diberikan seluruhnya	Informasi yang diminta tidak dikuasai	4	-	-	-
5	005/PPID.PJ/2018	12 Maret 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Chairani Fadhila Pravitasari	Warga Negara Indonesia	Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (data triwulanan) 1990:1-2017:1	Surat	Data Penelitian Tugas Akhir Strata-2	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan sebagian		11	-	-	-
6	006/PPID.PJ/2018	27 Maret 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Gizela Laurentza Christyantya	Warga Negara Indonesia	Data penerimaan pajak per sektor tahun 1998-2016 (data tahunan)	Surat	Keperluan data skripsi	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan seluruhnya		3	-	-	-
7	007/PPID.PJ/2018	6 April 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Gizela Laurentza Christyantya	Warga Negara Indonesia	Data penerimaan pajak per sektor (pertanian, tambang, air listrik dll, lengkap semua) dan grafik pertumbuhannya, dari tahun 1998-2016. Data yang dibutuhkan data tahunan	Surat	Keperluan data skripsi	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan sebagian		7	-	-	-
8	008/PPID.PJ/2018	25 Juli 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Mohammad Echsannullah	Warga Negara Indonesia	1. Penerimaan Pajak Pemerintah dan Penerimaan Bukan Pajak 2. Tax Ratio	Surat	Pembuatan Disertasi	Naskah Cetak (hardcopy)				Diberikan seluruhnya		4	-	-	-
9	009/PPID.PJ/2018	10 Agustus 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Avi Yulianti	Warga Negara Indonesia	Proxy Ratio total penerimaan pajak terhadap PDB periode kuartal I 2009 sampai kuartal IV 2016	Surat	Skripsi	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan sebagian		15	-	-	-
10	010/PPID.PJ/2018	10 Oktober 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Indra Bastian Tahir	Warga Negara Indonesia	data insentif pajak bagi kawasan ekonomi (berikat,KAPET, KPBPB, Dan KEK) di kabupaten dan kota	Surat	Pembuatan Disertasi	Naskah Elektronik (softcopy)				Tidak diberikan seluruhnya	Informasi yang diminta belum didokumentasikan	17	-	-	-
11	011/PPID.PJ/2018	18 Oktober 2018	Penerusan dari PPID Kemenkeu	Dedek Vivian Anjani	Warga Negara Indonesia	Penerimaan Pajak tahun 2014-2017 di kota semarang (Objek Pajak PKP)	Surat	Skripsi	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan sebagian	Informasi yang diminta belum didokumentasikan	17	-	-	-
12	012/PPID.PJ/2018	28 Desember 2018	Diterima Langsung	Satria Rahmadhani	Warga Negara Indonesia	Informasi persyaratan/proses/prosedur pindah PNS Pemda menjadi PNS lingkup Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kualifikasi pendidikan Diploma III Perpajakan	Surat	Pedoman pindah ke Direktorat Jenderal Pajak	Naskah Elektronik (softcopy)				Diberikan seluruhnya		10	-	-	-

Kp.:PJ.092/PJ.0922/2019

No.	Nomor Pendaftaran (1)	Tanggal Permohonan Masuk (2)	Penerusan / Diterima Langsung (Pilih *dropdown*) (3)	Nama Pemohon (4)	Kedudukan Hukum Pemohon: WNI/BHI (Pilih *dropdown*) (5)	Informasi yang Diminta (6)	Jalur Permohonan (Pilih *dropdown*) (7)	Tujuan Penggunaan Informasi (8)	Bentuk Informasi: *Hardcopy/Softcopy* (Pilih *dropdown*) (9)	Nomor Surat Pemberitahuan Perpanjangan (jika ada) (10)	Tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjangan (jika ada) (11)	Tanggal Pemberitahuan Tertulis (12)	Keputusan PPID: diberikan / tidak diberikan (Pilih *dropdown*) (13)	Alasan penolakan atau Alasan tidak diberikan seluruhnya (Pilih *dropdown*) (14)	Lama Waktu Pemberian Informasi (Hari Kerja) (15)	Tanggal Keberatan Diajukan kepada Atasan PPID (jika ada) (16)	Tanggal Tanggapan Keberatan dari Atasan PPID (jika ada) (17)	Tanggapan atas Keberatan dari Atasan PPID (jika ada) (18)
13	1/PPID.PJ.33.03/2018 (KPP Pratama Bekasi Selatan)	1 Maret 2018	Diterima Langsung	Harian Umum Swara Nasional Pos	Badan Hukum Indonesia	a. NPWP bendahara keuangan Pemkot Bekasi b. jumlah karyawan Pemkot Bekasi yang telah memiliki NPWP, dan apakah NPWP masing-masing karyawan terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan c. Nominal PPh Pasal 21 yang disetor Pemkot Bekasi dari gaji pokok PNS/ASN d. Nominal PPh Pasal 21 yang disetor Bendahara Keuangan atas penghasilan atau Tunjangan Daerah (TUNDA) ASN Pemkot Bekasi e. Nominal PPh Pasal 21 dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang disetor Bendahara Pemkot Bekasi f. Nominal PPh Pasal 21 yang bersumber dari penghasilan /TUNDA PNS dan PPh Pasal 21 dari gaji TKK di Pemkot bekasi Tahun Pajak 2016 dan Tahun 2017. g. Apakah dalam bukti setor PPh 21 tercantum nama Wajib Pajak (WP) dan nilai yang dipotong dari masing-masing ASN? h. Apakah terhadap gaji TKK yang bersumber dari APBD berlaku PTKP? i. Apakah berlaku PTKP atas penghasilan PNS yang bersumber dari APBD berupa TUNDA yang sifatnya diterima rutin dan teratur setiap bulan? j. Nilai PTKP untuk ASN dan TKK k. Jika TUNDA yang bersumber dari APBD dipotong PPh Pasal 21, apakah tidak lebih ideal jika terlebih dahulu dimasukan tunjangan pajak dari APBD? l. Jika terjadi kelebihan bayar PPh 21, apakah dapat direstitusi masing-masing WP (karyawan Pemkot Bekasi)? m. Apakah berlaku sifat lapisan PTKP terhadap PNS maupun TKK? n. Perbedaan TUNDA dengan honorarium dan imbalan o. Pengertian PPh Pasal 21 Final p. Bentuk formulir bukti potong atau bukti setoran PPh Pasal 21 bagi PNS	Surat	Cek *End Balance* Wartawan	Naskah Cetak (hardcopy)				Tidak diberikan seluruhnya	Informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	5	-	-	-

Direktur,

Hestu Yoga Saksama

Kp.:PJ.092/PJ.0922/2019

LAMPIRAN III
Nota Dinas Direktur P2Humas
Nomor : ND- 134 /PJ.09/2019
Tanggal : 07 Februari 2019

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT I DJP
TAHUN 2018

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
1	001/PPID.PJ/2018	16	-	-	-	-	-	-	-
2	002/PPID.PJ/2018	13	-	-	-	-	-	-	-
3	003/PPID.PJ/2018	16	-	-	-	-	-	-	-
4	004/PPID.PJ/2018	4	-	-	-	-	-	-	-
5	005/PPID.PJ/2018	11	-	-	-	-	-	-	-
6	006/PPID.PJ/2018	3	-	-	-	-	-	-	-
7	007/PPID.PJ/2018	7	-	-	-	-	-	-	-
8	008/PPID.PJ/2018	4	-	-	-	-	-	-	-
9	009/PPID.PJ/2018	15	-	-	-	-	-	-	-
10	010/PPID.PJ/2018	17	-	-	-	-	-	-	-
11	011/PPID.PJ/2018	17	-	-	-	-	-	-	-
12	012/PPID.PJ/2018	10	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		(rata-rata) 11	-	-	-	-	-	-	-

2. KANTOR WILAYAH DJP ACEH

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	**(Waktu Rata-Rata)**	-	-	-	-	-	-	-

3. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

4. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

5. KANTOR WILAYAH DJP RIAU

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

6. KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

7. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

8. KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

9. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

10. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

11. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

12. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

13. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

14. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

15. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

16. KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

17. KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

18. KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

19. KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
1	1/PPID.PJ.33.03/2018	5	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

20. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

21. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

22. KANTOR WILAYAH DJP YOGYAKARTA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

23. KANTOR WILAYAH DJP TIMUR I

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

24. KANTOR WILAYAH DJP TIMUR II

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

25. KANTOR WILAYAH DJP TIMUR III

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

26. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

27. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

28. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

29. KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

30. KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

31. KANTOR WILAYAH DJP BALI

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

32. KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

33. KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

34. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

35. KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	(Waktu Rata-Rata)	-	-	-	-	-	-	-

Direktur,

a.n. Hestu Yoga Saksama